

ANALISIS EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN CUKAI ROKOK TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN NEGARA

Adelia Muharamani¹⁾
Karin Nur Kartini²⁾
Gunardi³⁾
Tatiek Ekawati Permana⁴⁾
M.Yusuf Sanny⁵⁾

¹Politeknik Piksi Ganesha Bandung, amuharamani@piksi.ac.id

²Politeknik Piksi Ganesha Bandung, knkartini@piksi.ac.id

³Politeknik Piksi Ganesha Bandung, goenhadis@gmail.com

⁴Akademi Sekretari dan Manajemen Ariyanti, tatiek@ariyanti.ac.id

⁵Politeknik Piksi Ganesha Bandung, m.yusuf.sanny@piksi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefktifan penerimaan pendapatan Negara dari cukai rokok. Obyek dalam penelitian ini tentang pendapatan Negara yang berasal dari cukai rokok. Jenis penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan cukai rokok yang diketahui setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Kata Kunci: Cukai Rokok, Pendapatan Negara

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of state revenues from cigarette excise. The object of this research is state revenue from cigarette excise. This type of research is research using qualitative methods. The results of this study indicate that the effectiveness of cigarette excise revenue is known to increase every year.

Keywords: Cigarettes Tax, Country Income

PENDAHULUAN

Industri rokok mempunyai peran penting bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia (Nurhayat W, 2015). Dapat dilihat dengan banyak jumlah perusahaan rokok yang ada di Indonesia. Karena banyaknya jumlah produksi rokok, menjadikan Indonesia berada di urutan ke-3 sebagai Negara dengan jumlah perokok paling tinggi (Muhamad Nursam, 2021). Seperti yang disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam diskusi Pemanfaatan Pajak Rokok Daerah (PRD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), prevalansi perokok di Indonesia mencapai 33,8% atau sekitar 65,7 juta penduduk.

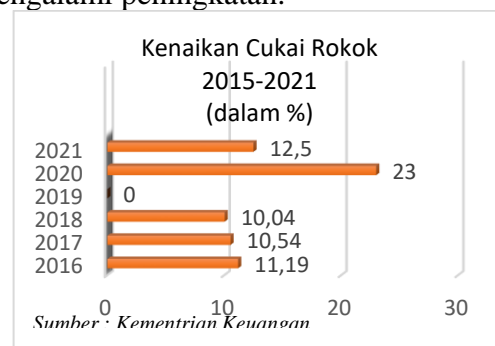
Rokok merupakan barang yang mengandung zat adiktif yang berbentuk gulungan panjang, didalamnya berisi tembakau dan biasanya digulung dengan kertas, daun atau kulit jagung (Gagan, 2017). Sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang-undang kesehatan pasal 113 ayat 2 menyebutkan bahwa tembakau dan/atau produk yang mengandung tembakau merupakan salah satu zat adiktif yang dapat merusak atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Berdasarkan Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai peran untuk mengatur jumlah distribusi tembakau, dengan cara menetapkan tarif cukai yang dibebankan kepada pengusaha rokok. Penenaan cukai untuk meningkatkan harga jual rokok dan menekan angka konsumsi pada rokok.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang menyebutkan bahwa barang yang konsumsinya mesti dikendalikan, serta peredarannya mesti diawasi, dan juga pemakaiannya mampu memicu dampak negatif bagi lingkungan, maka barang tersebut termasuk Barang Kena Cukai.

Cukai sendiri mempunyai dua fungsi yang harus dipegang, antara lain budgetair

yakni perlengkapan guna uang ke kas negara sebanyak-banyak yang pada saatnya biaya dipakai keperluan pengeluaran negara dan reguler yakni oleh perlengkapan yang mengelolah, mengoperasikan dan mengendalikan aktivitas ekonomi kearah yang lebih baik dan efisien. Untuk menyeimbangkan kedua fungsi tersebut tidaklah mudah, dikarnakan dibutuhkan kebijakan yang teliti bagi mengoptimalkan kedua-duanya. Sehingga pemerintah berkenaan memperbaharui kepastian menyelusuri tahap-tahap berupakan simplikasi aturan dan ekstensifikasi cukai, serta sinkronisasi antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Cukai.

Secara ekonomi tembakau dan rokok berdampak positif dan menguntungkan oleh perekonomian khususnya bagi penerimaan Negara. Tidak dipungkiri, Cukai rokok merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan Negara. Setiap tahun pendapatan Negara yang berasal dari sektor cukai mengalami peningkatan.



Grafik 2 Persentase Kenaikan Cukai Rokok 2016-2021

Dengan adanya peningkatan tarif cukai yang terjadi pada setiap tahunnya, memberikan kenaikan kepada pendapatan Negara. Namun disisi lain, dengan adanya kenaikan ini menyebabkan adanya peningkatan rokok ilegal dan cukai palsu, guna menghindari pemungutan cukai. Jika kecurangan tersebut setiap tahunnya meningkat, maka akan berdampak pada pendapatan Negara. akan terjadinya

pengurangan penerimaan dari sector cukai rokok.

Untuk meningkatkan penerimaan cukai rokok dan pengurangan penyeludupan rokok illegal atau pemakain cukai palsu, pihak DJBC selaku badan yang bertanggung jawab atau bea dan cukai melakukan kebijakan terkait pelunasan dan tarif, efek *forestalling* akibat kenaikan tarif cukai hasil tembakau serta upaya pengawasan dan penindakan rokok illegal yang tercatat efektif

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pemungutan cukai rokok yang masuk pada kas Negara.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 Nomor 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pajakbro.com, 2020), Murweni, I. (2018)

PPN

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (onlinepajak, 2016).

Bea dan Cukai

Bea adalah pungutan Negara yang dipakai pada beberapa barang yang di impor serta di ekspor. Sedangkan cukai adalah pungutan Negara yang dipakai pada beberapa barang spesifik yang memiliki karakter maupun ciri khas yang diputuskan dalam undang-undang (Firman, 2018).

Cukai Rokok

Pungutan yang dipungut Negara terhadap rokok dan produk tembakau lainnya,

termasuk sigaret, cerutu, serta daun rokok (BapendaProvinsiNTB, 2021).

Bea Masuk (Bea Impor)

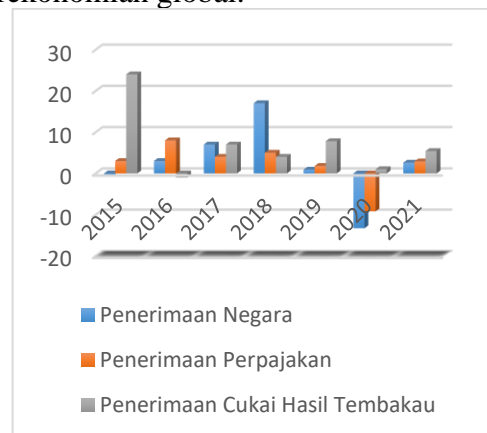
Pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean (Rani Maulida, 2018).

Bea Keluar

Pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor (Nora Galuh, 2021).

Hasil Pembahasan

Hasil dari penelitian yang kami lakukan, bahwa pertumbuhan pendapatan Negara dari sector cukai rokok mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2021 diproyeksikan meningkat 4,5% seiring dengan kondisi perekonomian domestik yang mulai membaik serta menggeliatnya perekonomian global.



Grafik 1 Pertumbuhan Penerimaan Negara, Perpajakan dan Cukai Rokok (% ,yoy)

Bea Masuk dan Cukai merupakan salah satu dari tujuh sector pajak yang dikelompokkan berlandaskan bermacam rupa Penerimaan Perpajakan. Cukai tercantum berkontribusi lebih-kurang sebesar 10% sepenuhnya atas penerimaan pajak pertahunnya. Akan tetapi, cukai sendiri membentuk sesuatu instrument fiskal yang tak sekedar berperan sebagai sumber pendapatan negara, dan fungsi lainnya yakni secara makro yang berpengaruh akan

keseimbangan perekonomian dan perilaku masyarakat.

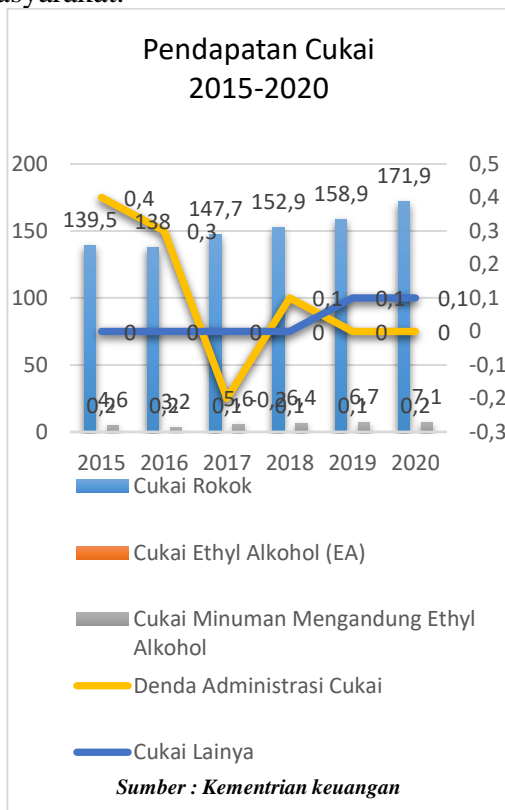


Table 2 Perkembangan Pendapatan Cukai 2015-2020

Bedasarkan data dari kementerian keuangan, pada tahun 2015-2020 cukai tembakau/rokok menjadi penyumbang terbesar di sektor pajak bea masuk dan cukai. Rokok penyumbang terbesar pada penerimaan negara dari sector cukai, menyumbang 97%. Meski pada tahun 2020 indonesia mengalami perlambatan ekonomi karena terdampak pandemic covid-19 , namun menurut Kementerian keuangan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau atau rokok hingga November 2020 mencapai Rp 146 triliun atau tumbuh 9,74 persen. Perolehan tersebut mencapai 88,53 persen dari target sesuai Perpes 72 tahun 2020 mencapai Rp 164.94 triliun. Sepanjang kuartal I/2021, realisasi penerimaan cukai Rp49,56 triliun atau 27,54 persen dari targetnya.

Kenaikan penerimaan cukai hasil tembakau/rokok ini didorong oleh kenaikan

tarif ketika produksi menurun 10,2 persen dari tahun 2019. Besaran tarif yang dikenakan adalah 10% dari cukai rokok dan besaran DBH adalah 2% dari penerimaan cukai hasil tembakau tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 rata-rata kenaikan tarif cukai rokok untuk mencapai 12,5 persen. Target yang diberikan oleh Pemerintah atas penerimaan dari cukai rokok tahun ini sebesar Rp 173,78 triliun.

Namun pemberlakuan tarif cukai rokok yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, menyebabkan maraknya terjadi peralihan penggunaan rokok bernikotin tinggi dan illegal. Berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 198/PMK.010/2020 tentang kenaikan tarif cukai hasil tembakau, kenaikan tersebut bertujuan untuk mengurangi angka konsumsi pada rokok. Namun karena naiknya harga eceran rokok, membuat masyarakat beralih ke rokok yang harganya murah atau illegal. Hal itu di khawatirkan akan berdampak pada penerimaan pendapatan Negara.



Table 3 Perkiraan Nilai BHP Rokok Illegal

Menurut Menteri Keuangan kenaikan cukai yang terjadi pada tahun 2020, menyebabkan peredaran rokok illegal berkisar 4,86 persen. Untuk meminimalisir terjadi peredaran rokok illegal, pemerintah membangun Kawasan Industri Hasil

Tembakau (KIHT) sebagai wadah pabrikan rokok kecil yang rawan masuk dalam pusaran rokok ilegal.

Pemerintah memberikan kemudahan perizinan, percepatan pelayanan, kebijakan fiskal dalam bentuk penundaan pembayaran selama Sembilan puluh hari, bagi perusahaan yang berada dalam KIHT. Selain itu, Ditjen Bea Cukai juga memfasilitasi pengusaha rokok yang berada di KIHT dengan membangun sinergi antar pihak yang saling terkait guna mendorong ekspor. Pemerintah berharap dengan pembentukan kawasan ini mampu menekan peredaran rokok ilegal kembali dibawah 3%

Pihak Bea Cukai juga menjalankan pengawasan terhadap cukai rokok secara rutin per triwulan. Pengawasan dilakukan oleh kantor-kantor pelayanannya di berbagai daerah di Indonesia terhadap produk rokok untuk memastikan tidak ada rokok yang harga di pasarannya dijual di bawah 85% dari harga banderol.

PENUTUP

Kesimpulan

Efektifitas penerimaan cukai rokok terhadap pendapatan negara setiap tahunnya mengalami kenaikan. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat dan lingkungan.

Cukai memegang dua fungsi, antara lain budgetair yakni perlengkapan guna uang ke kas negara sebanyak-banyak yang pada saatnya biaya dipakai keperluan pengeluaran negara dan regulend yakni perlengkapan yang mengelola, mengoperasikan dan mengendalikan aktivitas ekonomi kearah yang lebih baik dan efisien. Sehingga pemerintah berkenaan memperbaharui kepastian menyelusuri

tahap-tahap merupakan simplikasi aturan dan ekstensifikasi cukai, serta sinkronisasi antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Cukai.

Secara ekonomi tembakau dan rokok berdampak positif dan menguntungkan, khususnya bagi penerimaan Negara. Setiap tahunnya pendapatan Negara yang berasal dari sektor cukai mengalami peningkatan. Salah satu factor meningkatnya pendapatan Negara dari sector cukai rokok ialah dengan naiknya tarif pemungutan cukai rokok.

Untuk meningkatkan penerimaan cukai rokok dan mengurangi kecurangan, pihak DJBC selaku badan yang bertanggung jawab atau bea dan cukai melakukan kebijakan terkait pelunasan dan tarif, efek forestalling akibat kenaikan tarif cukai hasil tembakau serta upaya pengawasan dan penindakan rokok ilegal yang tercatat efektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat di ajukan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya manusia baik yang menerima dan mengelola serta mengoptimalkan penerimaan bagi hasil cukai Rokok yang diterima oleh Dinas Pendapatan sesuai tujuannya yakni mengembangkan serta meningkatkan PAD terutama di bidang pelayanan kesehatan.
2. Pihak DJBC selaku badan yang bertanggung jawab harus lebih bijak lagi dalam menindak industry rokok yang melakukan kecurangan saat pemungutan cukai rokok Untuk meningkatkan penerimaan cukai rokok

DAFTAR PUSTAKA

- (2016, November 30). Retrieved from online pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- (2017, Juni). Retrieved from Pajakbro.com: <https://www.pajakbro.com/2017/06/pengertian-pajak.html?m=1>
- admin. (2021, Februari 25). Retrieved from Bappenda Prov NTB: https://bappenda.ntbprov.go.id/page/berita/berita_detail.php?id=704&judul=MENGENAL%20PERBEDAAN%20CUKAI%20ROKOK%20DAN%20PAJAK%20ROKOK
- Cukai rokok*. (2021, Januari 13). Retrieved from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/tags/cukai-rokok>
- Dianka, A. A. (2020, Februari 7). *TrenAsia*. Retrieved from TrenAsia: <https://www.trenasia.com/cukai-rokok-naik-pita-palsu-diburu>
- Ekonomi*. (2020, 12 11). Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201211140605-535-580932/infografis-kontribusi-cukai-terhadap-pendapatan-negara>
- Fauzia, M. (2021, Februari 1). *Whats New*. Retrieved from Kompas: <https://amp.kompas.com/money/read/2021/02/01/103000026/per-hari-ini-tarif-cukai-rokok-resmi-naik-125-persen>
- Gagan. (2017, Juli 31). Retrieved from Dinas Kesehatan Banten: <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html>
- Galuh, N. (2021, April 12). Retrieved from News DDTC: <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-bea-keluar-29096>
- Gunawan, H. (2020, Desember 14). *Cukai Rokok*. Retrieved from lokadata: https://lokadata.id/artikel/penuh-harap-dari-rokok?_gl=1%2a1ao7svz%2a_ga%2aVDIHYjdjVUExNUtyYWJsMWdPQV83eDhDMVJDeHhNiQnhHbUNPVnVmUmI3RmJZM11BUDFHTGF&DekJYc21pWXVEdQ
- Idris, M. (2020, Desember 22). *Whats New*. Retrieved from Kompas: <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/12/22/072603126/meski-ada-corona-penerimaan-negara-dari-cukai-rokok-justeru-naik>
- Jayani, D. H. (2020, Desember 10). Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/10/rata-rata-cukai-rokok-naik125-pada-2021>
- Kementerian Keuangan. (2008, Agustus 11). Retrieved from Kemenkeu: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/55TAHUN2008PP.htm>
- Kurniati, D. (2021, Januari 27). *Berita Nasional*. Retrieved from DDTC News: https://news.ddtc.co.id/peredaran-rokok-ilegal-melonjak-sri-mulyani-singgung-tarif-cukai-27303?page_y=0
- Mahendra. (2019, Maret 22). *Jabar*. Retrieved from IDN Times Jabar: <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/mahendra/cukai-rokok-masih-jadi-pendapatan-terbesar-negara/1>
- Maulida, R. (2018, Oktober 2). Retrieved from online.pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/bea-masuk>
- MOULIZA, A. (2021). *EFEKTIVITAS PENERIMAAN CUKAI ROKOK TERHADAP*, 1-3.
- Mutia, C. (2020, Desember 14). Retrieved from databoks:

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/14/nilai-kerugian-akibat-rokok-ilegal-terus-meningkat-dalam-tiga-tahun-terakhir>
- Murweni, I. (2018). PELAKSANAAN PROGRAM TAX AMNESTY DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 2(2), 53-63.
- Nurhayat, W. (2015, Juni 20). *Detikfinance*. Retrieved from detikcom: <https://finance.detik.com/industri/d-2947821/begini-pentingnya-industri-rokok-bagi-ekonomi-ri>
- Nursam, M. (2021, April 29). Retrieved from Fajar News: <https://fajar.co.id/2021/04/29/mencegangkan-indonesia-peringkat-ketiga-jumlah-perokok-terbesar-di-dunia/>
- Prakoso, J. P. (2021, Januari 27). *Ekonomi*. Retrieved from Bisnis.com: <https://m.bisnis.com/amp/read/20210127/9/1348650/peredaran-rokok-ilegal-49-persen-di-2020-menkeu-beri-target-muskil-untuk-bea-cukai>
- Prakoso, J. P. (2021, April 27). *Pajak*. Retrieved from Bisnis.com: <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20210427/259/1387078/rokok-berkontribusi-besar-untuk-penerimaan-negara-dari-cukai-menyumbang-97-persen>